

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri dari negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum, pada proses tersebut rakyat dilibatkan di dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wakil rakyat dan pejabat pemerintah dengan tata cara dan prosedur yang telah diatur di dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya Rudini (1991: 3) mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah:

”Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk membuat suatu sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, menurut sistem permusyawaratan dan perwakilan. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa pemilihan umum itu tiada lain sebagai alat atau sarana untuk mengembangkan demokrasi.”

Tuntutan penyelenggaraan negara yang lebih berdemokrasi telah mengembangkan proses pemilihan umum menuju kepada proses pemilihan yang lebih baik lagi. Hal ini ditandai dengan diadakannya suatu pemilihan umum secara langsung baik dalam memilih wakil rakyat yang akan duduk diparlemen, pejabat daerah serta kepala negara. Sejalan dengan hal tersebut, maka segala bentuk partisipasi masyarakat untuk mensukseskan pemilihan umum menjadi suatu keharusan baik itu partisipasi dalam bentuk memilih dengan hati nurani ataupun dengan menjaga agar proses pemilihan berjalan dengan jujur dan adil sesuai dengan undang-undang. Proses ikut berpartisipasi masyarakat secara kolektif pada pemilihan umum merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangan tersebut dibutuhkan partisipasi besar dari masyarakat agar pemilu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Demokrasi di Indonesia memerlukan partisipasi politik, yang secara umum diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan (public policy) (Miriam Budiharjo, 1998 : 1).

Partisipasi politik menurut Nie dan Verba dalam Handbook of Political Science adalah : “Kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Yang diteropong terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk

mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Sekalipun fokus sebenarnya lebih luas tetapi abstrak, yaitu otoratif untuk masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memutuskan untuk memberikan partisipasi politik tentunya mempunyai tujuan tersendiri dan dengan cara mereka sendiri, sehingga menghasilkan sebuah keuntungan bagi mereka, yakni dengan cara memaksimalkan daya tawar mereka dalam menentukan calon yang mereka pilih yang memiliki muatan politik untuk memperjuangkan hak – hak yang mereka punya dan yang seharusnya mereka dapatkan. Namun partisipasi politik bukan hanya dilihat dari berapa jumlah warga yang memberikan suara dalam Pemilu Legislatif, namun kita lihat juga bagaimana antusias warga menghadapi Pemilu Legislatif, siapa saja yang bersedia untuk menjadi petugas TPS, dan siapa saja yang aktif sebagai anggota partai politik dan menjadi juru kampanye, sehingga dari sana dapat digolongkan untuk beberapa kelompok atau intensitas partisipasi politik yang ada di dalam masyarakat. Misalnya ada yang masuk dalam tingkatan aktivis, partisipan, pengamat bahkan orang-orang apolitis.

Menurut Lipset, dalam penelitian yang dilakukannya dalam partisipasi, menyatakan bahwa:

“Pendapatan, pendidikan, dan status merupakan faktor penting dalam proses partisipasi, atau dengan perkataan lain orang yang pendapatannya tinggi, pendidikan baik dan status social tinggi cenderung lebih banyak berpartisipasi daripada orang yang berpendapatan serta pendidikannya rendah (Miriam Budiharjo 1998:9)”.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa banyak faktor – faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat, sehingga

partisipasi politik antar individu dalam masyarakat itu berbeda. Faktor faktor tersebut memberikan suatu dimensi bagi setiap individu dalam masyarakat mengenai pandangannya terhadap cara partisipasi politik yang mereka gunakan.

Salah satu hal yang mempengaruhi cara partisipasi politik yang digunakan masyarakat adalah pendidikan. Mengapa demikian, karena pendidikan membentuk suatu kesadaran politik dan dari kesadaran politik tersebut masyarakat menentukan cara partisipasi politik yang digunakan olehnya. Hal ini sejalan dengan apa yang diterangkan oleh Jefry M. Paige (www.mediaindo.co.id) yang memberikan dua indikator dalam menjelaskan intensitas atau cara partisipasi politik, yakni:

“Pertama, kesadaran politik yakni kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang menyangkut pengetahuannya mengenai lingkungan masyarakat dan politik serta menyangkut minat dan perhatiannya terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Kedua, kepercayaan politik yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah dan sistem politik yang ada, apakah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak”.

Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan yang diterima oleh masyarakat Indonesia cenderung rendah dan kalah jauh dengan pendidikan yang berasal dari Negara maju dan sudah tentu hal tersebut mempengaruhi intensitas partisipasi politiknya, dimana dengan pendidikan yang rendah yang diterima masyarakat sudah tentu penghasilannya juga rendah dan ini bisa dijadikan alat untuk memobilisasi suara mereka dalam pemilu dengan menggunakan uang untuk membeli suara mereka. Selain itu dengan pendidikan rendah, kadang suatu masyarakat menjadi kolot, dimana faktor kesukuan menjadi hal utama memilih calon dalam pemilu atau simbolisasi terhadap seseorang

menjadi penentu dalam melakukan partisipasi politik tanpa melihat kualitasnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan tingkatan pada jalur pendidikan formal, yakni pendidikan dasar (SD, SMP), pendidikan menengah (SMA), dan pendidikan tinggi (Universitas/ sederajat). Bila menghubungkan *basic* tingkat pendidikan yang diterima masyarakat dengan cara partisipasi politik yang digunakannya, tentu saja berpengaruh. Hal ini dapat terlihat dengan banyak yang bermata pencaharian rendah yang akibat dari rendahnya pendidikannya dapat dimonopoli suaranya dalam Pemilu. Seperti dengan adanya politik uang ataupun hal lain seperti bantuan sembako sehingga disini dapat terlihat cara partisipasi politik yang digunakannya termasuk dalam konteks partisipan namun dalam bentuk yang dimonopoli dan tidak otonom. Namun tidak semua yang berpendidikan rendah dapat dimonopoli dalam menggunakan hak pilihnya, banyak juga masyarakat yang berpendidikan rendah malah menjadi orang yang apolitis, dimana karena ketidakpercayaan terhadap calon yang maju sebagai anggota parlemen, mereka memilih untuk golput.

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap intensitas partisipasi politik, dapat terjadi pada masyarakat di Kelurahan Yosorejo, hal ini disebabkan masyarakat setempat merupakan masyarakat urban yang mana berasal dari berbagai daerah yang pindah dan menetap di Kelurahan Yosorejo. Pada tingkat pendidikannya rata-rata SMA dan tidak sedikit mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Jika dilihat dari

tingkat pendidikan yang relatif tinggi, maka bisa diasumsikan bahwa masyarakat Kelurahan Yosorejo mempunyai pola pikir pengetahuan yang tinggi dengan mengetahui berita yang aktual mengenai politik dan pemerintahan sehingga bila diasumsikan partisipasi politik yang dilakukan mereka tinggi. Walaupun kenyataannya dalam pemilu Legislatif pada tahun 2009 yang lalu didapati jumlah golput Kelurahan Yosorejo terbesar dari seluruh Kelurahan di Kota Metro, yakni sebesar 30,01% atau sejumlah 1.474 orang dari total jumlah pemilih tetap yang sebesar 4.896. Sehingga dapat menjadi menarik bila dilakukan penelitian untuk mencari signifikan atau tidak pengaruh tingkat pendidikan yang membentuk kesadaran politik terhadap intensitas partisipasi politik pada masyarakat Kelurahan Yosorejo dalam pemilu legislatif 2009.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan sebuah permasalahan yang nantinya akan diteliti yaitu “Seberapa besarkah pengaruh tingkat pendidikan terhadap intensitas partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kelurahan Yosorejo?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap intensitas partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kelurahan Yosorejo.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan diketahuinya tujuan penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini akan berguna untuk:

1. Sebagai acuan Pemerintah dalam melihat suatu partisipasi politik masyarakat yang ditinjau dari tingkat pendidikan sehingga kedepannya sosialisasi politik dapat lebih intens dilakukan.
2. Sebagai acuan bagi partai politik untuk dapat melihat bahwa pendidikan mempunyai pengaruh dalam partisipasi politik masyarakat.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para calon legislatif daerah dalam merumuskan strategi pemenangan Pemilihan Legislatif dengan memperhatikan tingkat pendidikan sebagai salah satu faktornya.